

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

TAHUN 2023



Alamat Jln. Trikora No. 1 Gedung Serba Guna Lantai.2 Telp. (0511) 4780069
Banjarbaru 70713 Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id/>
Email: inspektorat@banjarbarukota.go.id

Kata Pengantar

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Banjarbaru Periode 2021-2026. Secara garis perubahan perlu dilakukan sebagai wujud hasil evaluasi atas kesesuaian dengan tugas dan fungsi Inspektorat serta keselarasan dengan RPJMD Kota Banjarbaru.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2023, Inspektorat Kota Banjarbaru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholder yang menunjukkan peran utama Inspektorat sebagai unsur pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

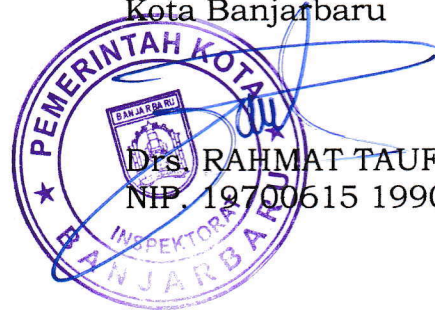
Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru mengacu pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru merupakan media akuntabilitas atas kinerja pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023.

Secara garis besar, capaian kinerja sasaran strategis yang diukur dengan IKU telah sesuai dengan rencana yang telah diperjanjikan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan target telah mencapai target yang direncanakan.

Capaian kinerja ini diharapkan menjadi penyemangat dan pendorong bagi seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di Lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru dalam meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat. Serta untuk mencapai target kinerja sesuai Rencana Strategis Inspektorat Kota Banjarbaru Periode 2021-2026.

Banjarbaru, Febuari 2024

Inspektur
Kota Banjarbaru



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
NIP. 19700615 199003 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 berisi kinerja tahun 2023 dengan mengaitkan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat. Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 yang merupakan bentuk komitmen penuh Inspektorat untuk mencapai kinerja optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam sasaran strategis yang ditetapkan.

No	Indikator Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Level 3	Level 3	100
2.	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Level 3	Level 3	100

Berdasarkan pengukuran kinerja secara keseluruhan capaian kinerja pada tahun 2023 yang di ukur berdasarkan 2 Indikator Kinerja Utama memperoleh predikat “baik” dengan 2 (dua) indicator sasaran strategis telah mencapai target. Pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2023 rata-rata dalam terkategori Sangat Memuaskan (Rentang Capaian Kinerja > 90 – 100 (%)).

DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2023

ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
15.176.298.250	13.926.502.013	91.76

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi.....	10
1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Pengawasan	14
1.5 Sistematika Penyajian.....	20

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Indikator kinerja Utama	21
2.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023.....	29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Eselon II.....	35
3.2 Capaian Kinerja Eselon III.....	49
3.3 Capaian Kinerja Eselon IV dan sub Koordinator.....	75
3.4 Realisasi Anggaran.....	100

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan.....	103
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan, Golongan/Kepangkatan
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2021
Tabel 2.2	Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
Tabel 3.3	Fokus Evaluasi Maturitas SPIP
Tabel 3.4	Gradasi Tingkat Maturitas SPIP
Tabel 3.5	Nilai Maturitas SPIP Kota Banjarbaru Setelah Bimtek Penilaian Risiko
Tabel 3.6	Penilaian Kapabilitas APIP
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Propinsi IKU
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPJMD dan Target Nasional
Tabel 3.11	Tabel Alokasi Dana Anggaran Bidang Pengawasan Tahun 2021
Tabel 3.12	Efesiensi penggunaan sumber daya dan program/kegiatan menunjang
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
Tabel 4.1	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Banjarbaru**
- Gambar 1.2 Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Kota Banjarbaru**
- Gambar 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Banjarbaru**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2009 Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Instansi Pemerintah mengamanatkan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja (LKj). LKj kemudian didefinisikan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Lebih lanjut Permepan No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Pelaporan kinerja disusun dengan maksud mencapai dua tujuan. Tujuan pertama untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Tujuan kedua sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatnya kinerjanya.

Oleh karena itu, LKj ini disusun untuk memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru selama tahun 2022. Selain itu, laporan kinerja disusun untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu sebagai

pertanggungjawaban kepada *stakeholder* dan sebagai evaluasi untuk peningkatan kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru untuk periode yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Dasar Hukum Pembentukan SKPD

Inspektorat Kota Banjarbaru dibentuk seiring dengan berdirinya Kota Banjarbaru itu sendiri, yaitu tepatnya tahun 1999, bersamaan dengan dibentuknya Satuan Kerja Pemerintah Daerah Badan Kesbangpol dan Badan Kepegawaian Daerah. Bersamaan dengan itu, dilantik para pejabat strukturalnya. Inspektorat Kota Banjarbaru ketika itu dipimpin oleh seorang Inspektur yang Pertama bernama Drs. Budi Yamin, membawahi beberapa Pemeriksa antara lain Pemeriksa Aparatur, Pemeriksa Perekonomian dan Pembangunan, Pemeriksa Keuangan. Pada saat bernama Inspektorat Kota Banjarbaru, struktur organisasinya terdiri dari Inspektur membawahi Kepala Bagian Tata Usaha, Bidang Pemeriksaan Aparatur, Bidang Pemeriksaan Perekonomian dan Pembangunan, dan Bidang Pemeriksaan Keuangan. Pada Bagian Tata Usaha membawahi masing-masing 3 Kasubsi, dan bidang-bidang membawahi masing-masing 3 Kasi. Dan pada saat struktur organisasi bernama Inspektorat, Inspektur menduduki jabatan Eselon III.A sedangkan Kepala Bidang Eselon IV.A dan Kasubsi serta Kasi Eselon V.A.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan Organisasi Struktur dan Nama Inspektorat berubah-ubah, diantaranya bernama Badan Pengawasan Daerah Kota Banjarbaru, kemudian setelah terbitnya Undang-undang No.23 Tahun 2010 berubah dan kembali bernama Inspektorat. Adapun dasar Hukum pembentukan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
- c. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.
- d. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 17 Juli 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

- e. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.
- f. Inspektorat Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru. Inspektorat Kota Banjarbaru mempunyai tugas pokok membantu Walikota mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 Gambaran Umum SKPD

Inspektorat Kota Banjarbaru merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Banjarbaru mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan menyelenggarakan pembinaan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kota Banjarbaru mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan Walikota;
- c. Penyelenggaraan pembinaan kegiatan pemerintahan daerah;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pengawasan;
- e. Fasilitasi kegiatan pengawasan lintas sektor;
- f. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan pemerintahan daerah; dan
- h. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Uraian tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru berdasarkan Perda Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 dan Perwali Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2021 terdiri atas :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi : Umum dan Kepegawaian & Perencanaan dan Keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyimpanan bahan organisasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. Penghimpunan, pengolahan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Penyusunan, penginventarisasian, dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan rumah tangga.

Sekretariat terdiri dari :

➤ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian ini mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga serta evaluasi laporan pengawasan yaitu menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai, menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional, melakukan administrasi pengaduan masyarakat, menyusun laporan kegiatan pengawasan.

➤ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian ini mempunyai tugas pokok melakukan urusan keuangan, menyiapkan bahan, penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan

peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

➤ Inspektur Pembantu Wilayah

Terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan di wilayah masing-masing. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perencanaan program pengawasan di wilayah masing-masing;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah masing-masing;
- Penyelenggaraan pembinaan kegiatan pemerintah daerah;
- Fasilitasi kegiatan pengawasan lintas sektor;
- Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah masing-masing; dan
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan pemerintahan daerah.

➤ Inspektur Pembantu Wilayah Pencegahan dan Investigasi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun program pengawasan;
- Merumuskan kebijaksanaan dan fasilitasi pengawasan dalam pelaksanaan kasus serta pengaduan (NSPK);
- Menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP) dan Program Pemeriksaan Tim (PPT);
- Melaksanakan tugas investigasi dan penanganan atas pengaduan orang / perorangan, masyarakat, dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) atau laporan pengaduan lainnya;
- Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi inspektur;
- Melaksanakan tugas penanganan atas TPTGR dan kerugian keuangan;
- Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Melaksanakan tugas atas laporan gratifikasi ;
- Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi;
- Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi;

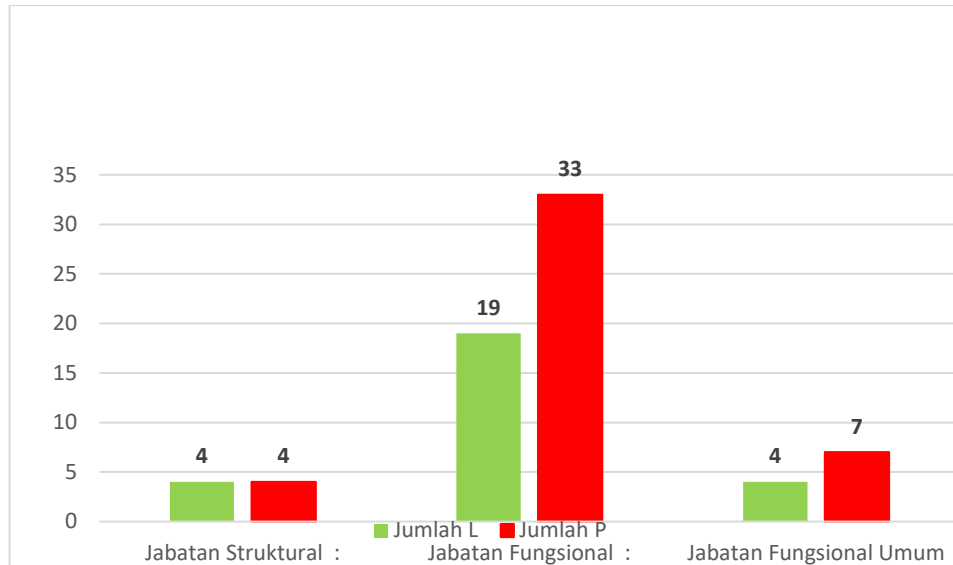
- Melaksanakan kegiatan pengawasan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan penilaian Zona Integritas (ZI);
- Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- Menyusun bahan dan melaksanakan pemeriksaan penanganan benturan kepentingan;
- Menyusun bahan dan melaksanakan pemeriksaan penanganan Whistle Blowing Sistem (WBS);
- Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan evaluasi Pelayanan Publik;
- Melaksanakan kegiatan self assessment/ evaluasi mandiri peningkatan kapabilitas APIP;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, melakukan pemantauan Monitoring Center for Prevention (MCP);
- Memeriksa dan meneliti Pokok-pokok hasil Pemeriksaaan (PPHP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Melakukan pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat pada website SPAN LAPOR.
- Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional tersebut terdiri atas tenaga fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Auditor Kepegawaian yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Jabatan Fungsional tersebut mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 Struktur Organisasi

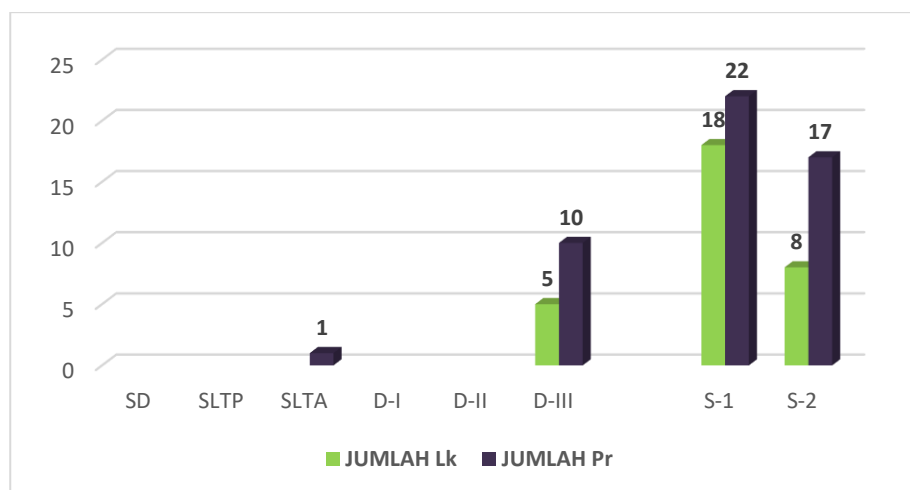
Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Banjarbaru didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Keadaan Pegawai Inspektorat Kota Banjarbaru per 31 Desember 2023 berjumlah 66 orang. Adapun jumlah dan kualifikasi pegawai Inspektorat Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 1.1
Jabatan berdasarkan Jenis Kelamin



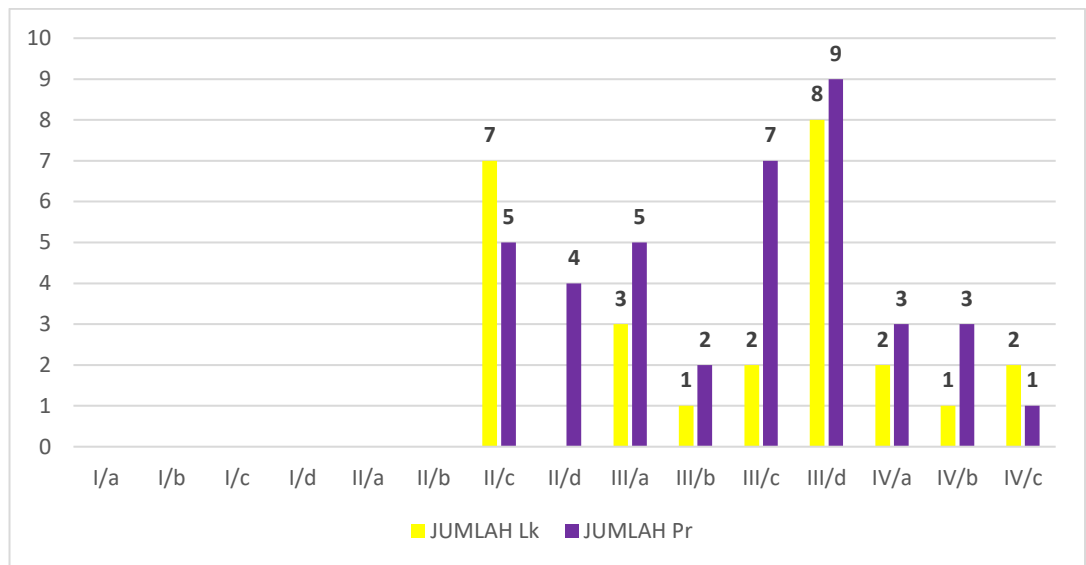
Berdasarkan grafik di atas presentase jabatan terhadap laki-laki dan Perempuan menyatakan bahwa di setiap jabatan Perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Grafik 1.2
Kualifikasi pendidikan berdasarkan Jenis kelamin



Berdasarkan grafik di atas kualifikasi pendidikan berdasarkan jenis kelamin terhadap laki-laki dan Perempuan menyatakan bahwa di setiap jabatan Perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

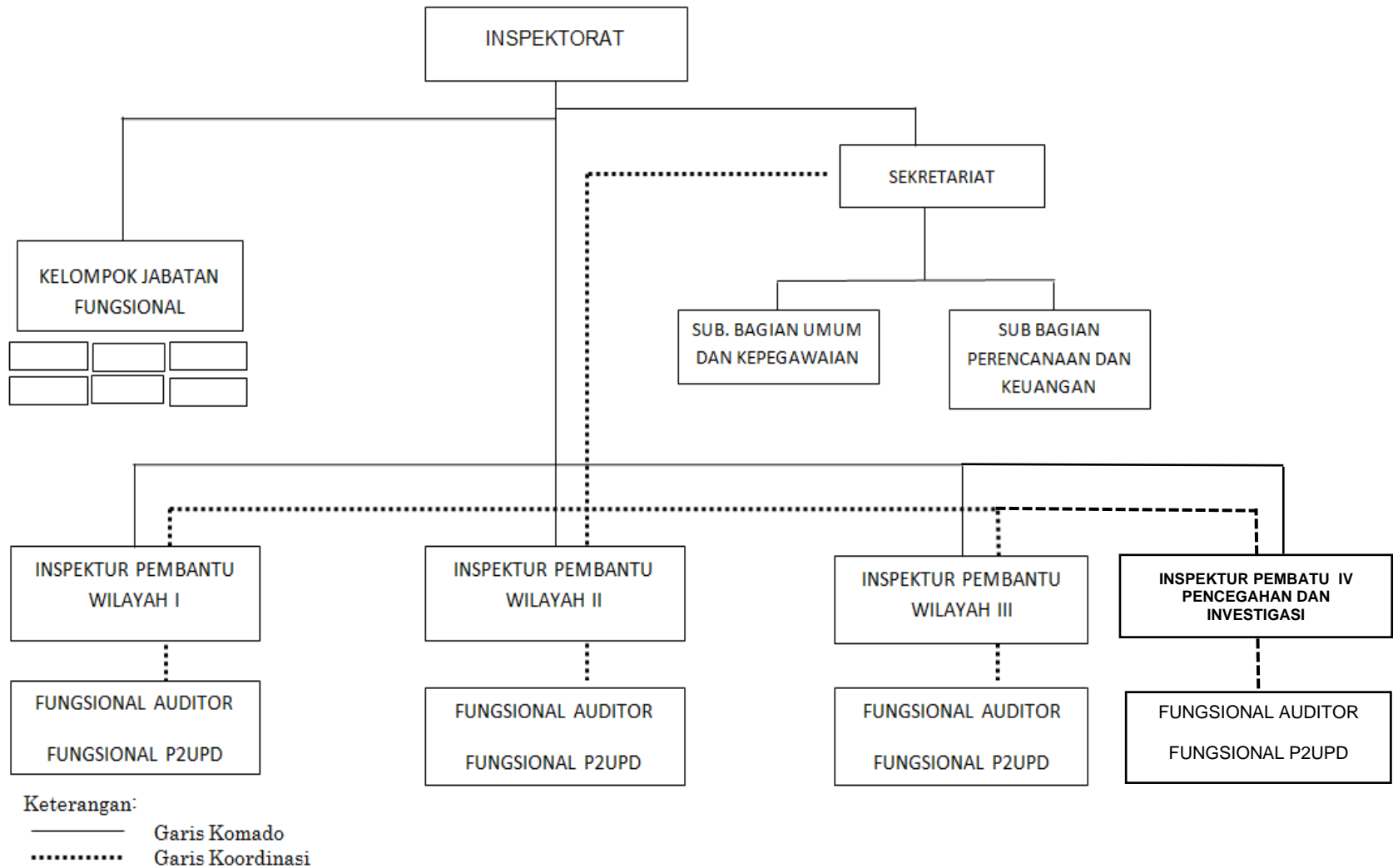
Grafik 1.3
Kualifikasi pangkat dan golongan berdasarkan Jenis kelamin



Berikut sajian kualifikasi pangkat dan golongan berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan Perda Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 dan Perwali Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2021, Struktur Organisasi Inspektorat Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Banjarbaru



1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Pengawasan

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan mengawal pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru, Inspektorat Kota Banjarbaru telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Sehubungan dengan hal tersebut, pengawasan yang dilaksanakan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis berikut ini :

a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat, sebagai lembaga pengawas di lingkup Pemko Banjarbaru ditetapkan sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator sasaran yaitu **Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)**. Permasalahan tata kelola pemerintahan salah satunya terlihat dari tingkat kematangan implementasi (maturitas) penyelenggaraan SPIP. Semakin matang maturitas SPIP menunjukkan upaya komprehensif suatu instansi yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai untuk secara terus menerus mengendalikan pencapaian tujuan instansi melalui pemastian bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan telah handal, harta telah dipelihara keamanannya dan ketaatan pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.

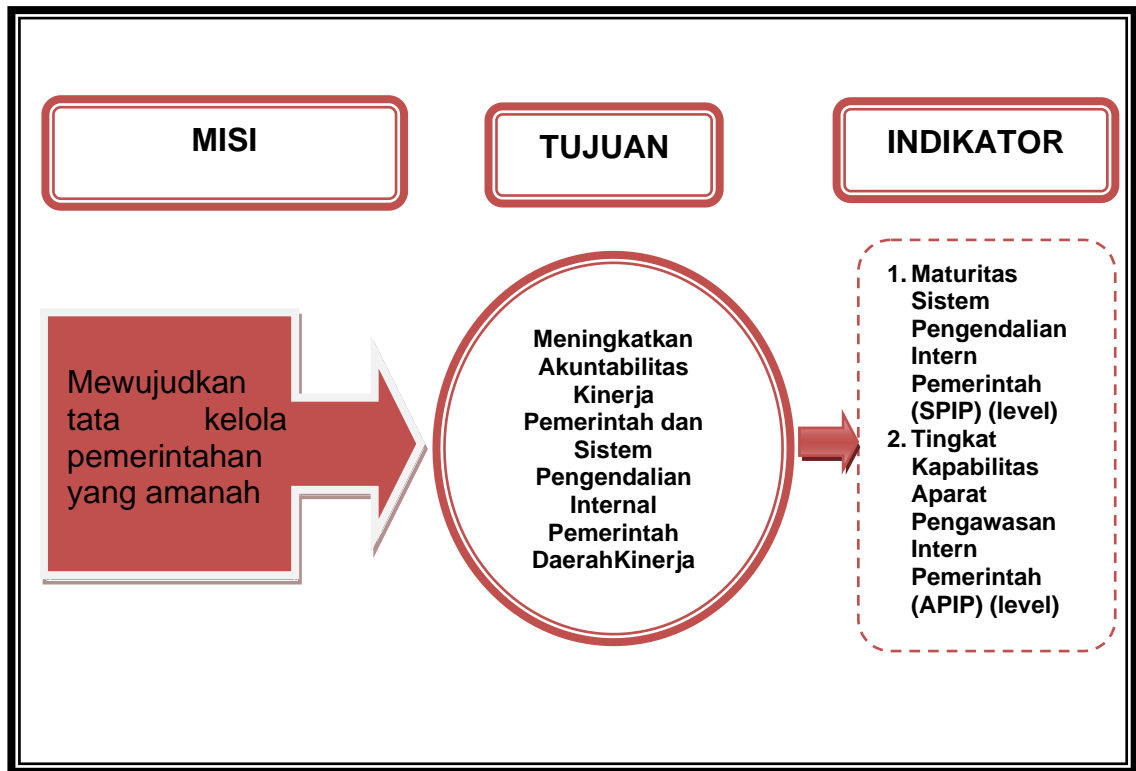
b. Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Sasaran tersebut dipilih untuk menggambarkan Perubahan paradigma peranan APIP yang utamanya *watch dog* menjadi *catalist* (fasilitator dan *agent of change*). Peran ini berkaitan dengan pemberian jasa jaminan kualitas yang memberikan dampak jangka panjang terhadap pemenuhan tujuan pemerintah daerah. Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja dengan **Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)**. Level Kapabilitas APIP ditargetkan pada tahun 2021 berada di Level 3.

Penilaian Kapabilitas dilakukan secara *self assessment* oleh Inspektorat sendiri. Akan tetapi, dilakukan verifikasi oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dan BPKP pusat, serta Level Kapabilitas ditetapkan oleh BPKP Pusat.

Dengan adanya perumusan tujuan strategis memungkinkan Inspektorat Kota Banjarbaru untuk mengukur pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat diukur keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Tujuan dan indikator tujuan dijabarkan pada gambar berikut ini.

Gambar 1.2
Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan
Inspektorat Kota Banjarbaru



Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dimana Inspektorat sebagai unsur pengawas pemerintah daerah dituntut untuk berperan sebagai Institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap jalannya pembangunan daerah, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean governance*).

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah masih rendahnya kapasitas APIP. Adapun permasalahannya yang dihadapi, yaitu :

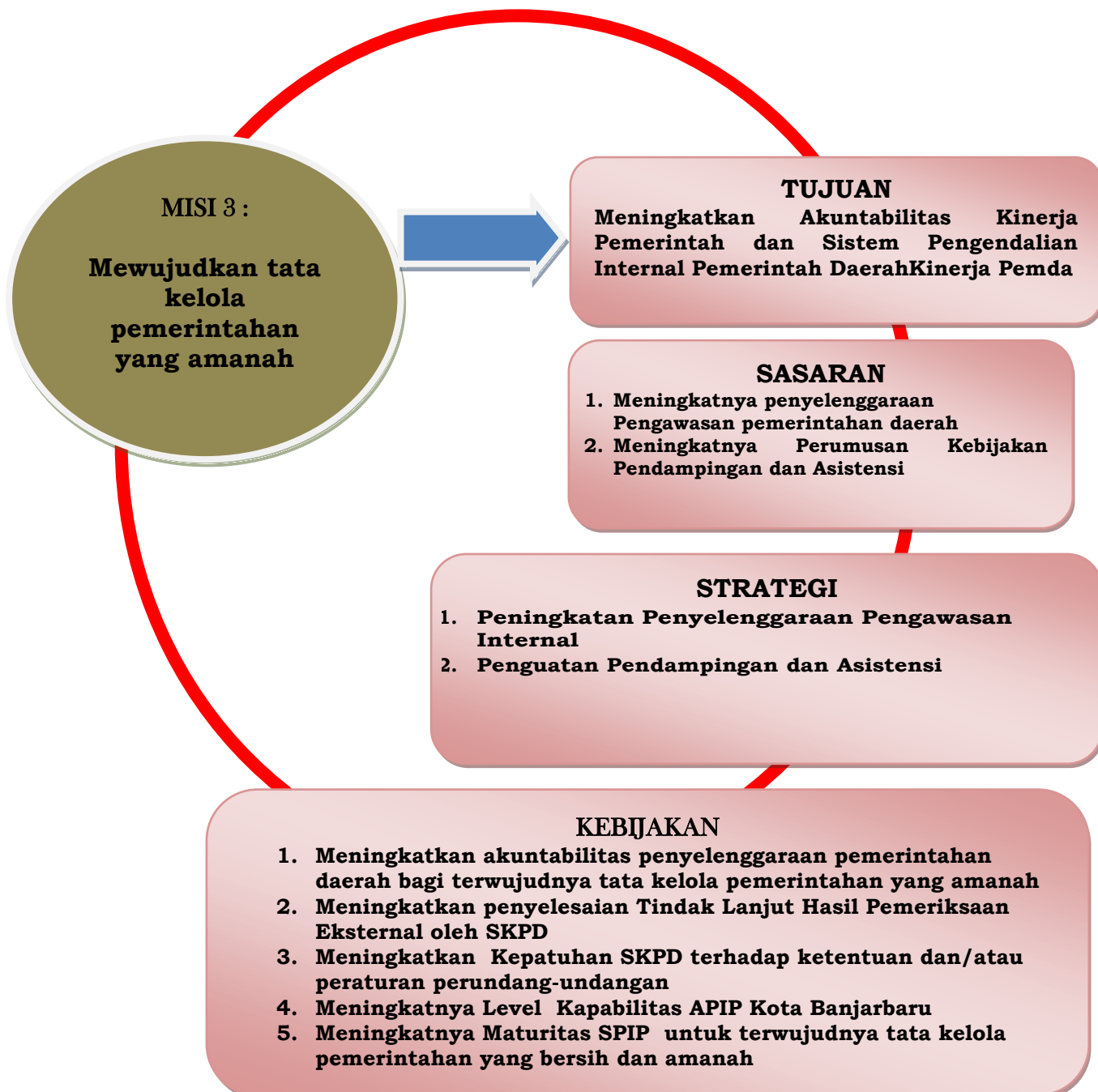
- Sarana dan prasarana pendukung masih belum memadai.
- Entitas masih kurang kooperatif dalam mendukung tugas pengawasan.
- Masih lemahnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Capaian kinerja inspektorat di pengaruhi oleh pihak eksternal seperti SKPD, BPKP, dan BPK.
- Belum sepenuhnya Auditan memahami fungsi Inspektorat dalam hal fasilitasi, asistensi, pendampingan dan asistensi.
- Kemampuan memaksa dalam pemenuhan terhadap temuan pemeriksaan masih lemah karena posisi inspektorat setara dengan auditan.

Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan pragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK-RI. Isu yang ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan.

Strategi dan Kebijakan Pengawasan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat Kota Banjarbaru selalu menjunjung semangat dan komitmen melaksanakan manajemen tata pemerintahan yang baik dan mewujudkan pembaharuan dan perbaikan dalam bidang pengawasan. Dan dalam rangka menentukan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah, maka Inspektorat Kota Banjarbaru telah membuat perencanaan yang dituangkan dalam RENSTRA Inspektorat periode 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 yaitu :

Gambar 1.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Inspektorat Kota Banjarbaru



1.5 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika berikut ini :

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1 Latar belakang
 - 1.2 Dasar hukum Pembentukan dan Gambaran umum organisasi
 - 1.3 Struktur Organisasi
 - 1.4 Aspek strategis organisasi dan isu strategis organisasi
 - 1.5 Sitematika penyajian
- BAB II Perencanaan Kinerja
 - 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Indikator kinerja Utama
 - 2.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023
- BAB III Akuntabilitas Kinerja
 - 3.1 Capaian Kinerja Eselon II
 - 3.2 Capaian Kinerja Eselon III
 - 3.3 Capaian Kinerja Eselon IV dan Sub Koordinator
 - 3.4 Realisasi Anggaran
- BAB IV Penutup
 - 4.1 Simpulan
 - 4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 mendefinisikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP salah satunya meliputi rencana strategis dan perjanjian kinerja.

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama

Inspektorat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2023 setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan komitmen Inspektur kepada Walikota Banjarbaru untuk berkinerja, sesuai dengan apa yang diperjanjikan berdasarkan tugas, pokok, fungsi, wewenang dan Sumber daya yang dimiliki yaitu dalam tabel berikut ini.

Berikut ini merupakan perjanjian kinerja perubahan tahun 2023 antara Inspektur dengan Walikota Banjarbaru per Oktober 2023.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Eselon II
Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level	Level 3
2	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Level 3

Untuk mencapai 2 (dua) tujuan tersebut ditetapkan sasaran berikut ini.

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan. Dengan indikator sebagai berikut :

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level).

Yang didukung oleh Program Penyelenggaran Pengawasan.

2. Meningkatkan Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi. Dengan indikator sebagai berikut :

Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level).

Yang didukung oleh Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Eselon III (Sekretaris)
Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan fasilitasi Pengawasan	Presentase ketersedianya dokumen kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan dan fasilitasi	1 dokumen
2	Meningkatnya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%
3	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%
4	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
5	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%
6	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%
7	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%
8	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%

Untuk mencapai indikator tersebut maka di dukung oleh kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Eselon III (Irbn)
Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	90%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan	85%
2	Meningkatnya Penanganan Kasus dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan Perundang-undangan yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	100%
3	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase ketersediaan dokumen kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan dan fasilitasi	100%
		Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	90%

Untuk mencapai 2 (dua) tujuan tersebut ditetapkan sasaran berikut ini.

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
 Dengan indikator sebagai berikut :
 - a. *Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan*
 - b. *Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan*

c. *Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan Yang didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.*

2. Meningkatnya Penanganan Kasus dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Dengan indikator sebagai berikut :

Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan SAP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan

Yang didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Eselon IV
(Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)
Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2023

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang	1 rekomendasi
2	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan
4	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/ bulan
5	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen

6	Terlaksananya Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan
---	---	--	------------

Untuk mencapai indicator tersebut maka di dukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
6. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Eselon IV
(Kasubbag Umum dan Kepegawaian)
Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket
2	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket
3	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket

4	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
7	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit
8	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit
9	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 paket
10	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket
11	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan
12	Terlaksananya Pengadaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit
13	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit

14	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit
----	---	---	--------

2.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

Rencana yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2023 mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru telah sesuai ketentuan;
2. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru;
3. Review atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru, seperti review atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru, review atas laporan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru dan kegiatan review lainnya;
4. Monitoring dan Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru, seperti evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan APIP maupun BPK; dan
6. Pengawasan intern lainnya (jasa Advis) yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Pemeriksaan kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD) Kota Banjarbaru dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2022 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.

8. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu :
 - a. Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi; dan
 - b. Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
 - c. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi :
 - 1) Kinerja Rutin Pengawasan
 - Review dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan yang meliputi :
 - ✓ Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2023 dan Perubahan 2022;
 - ✓ Review Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023;
 - ✓ Review Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023 dan Perubahan 2022;
 - ✓ Review Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2023 dan Perubahan 2022.
 - Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2021;

- Review Laporan Kinerja Kota Banjarbaru dan Laporan Kinerja SKPD Tahun 2021;
- Review laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kota Banjarbaru Tahun 2021;
- Review dana alokasi khusus (DAK) Fisik;
- Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas; dan
- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah.

2) Pengawasan Prioritas Nasional

- Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
- Evaluasi perencanaan dan penganggaran berbasis gender (responsive gender);
- Pemeriksaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Pengawasan Reformasi Birokrasi yang meliputi :
 - ✓ Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - ✓ Asistensi pembangunan reformasi birokrasi pada area penguatan pengawasan yang meliputi :
 - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;

- Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - Penilaian internal zona integritas;
 - Penanganan benturan kepentingan;
 - Penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
 - Penanganan pengaduan masyarakat.
 - Asistensi Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - Penegakkan Integritas
 - ✓ Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas; dan
 - ✓ Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi.
 - Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
 - ✓ Penerapan Manajemen Risiko;
 - ✓ Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 - ✓ Audit Kinerja;
 - ✓ Audit Investigasi;
 - ✓ Pemeriksaan DAK Fisik;
 - ✓ Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
 - ✓ Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.
- 3) Pemberian Jasa Konsultasi dan Jasa Narasumber terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru.

Adapun kegiatan tersebut di dukung dengan anggaran sebagai berikut :

PROGRAM /KEGIATAN	PAGU Anggaran	Realisasi	Persentasi
TOTAL	15,176,298,250	13,926,502,013	91.76%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,295,646,100	9,651,295,308	93.74%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105,730,000	92,987,200	87.95%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36,000,000	28,828,700	80.08%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69,730,000	64,158,500	92.01%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,429,815,220	7,910,084,914	93.83%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,405,856,420	7,892,887,914	93.90%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,432,000	9,269,200	60.06%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8,526,800	7,927,800	92.98%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	534,404,500	515,649,033	96.49%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,052,000	12,734,990	97.57%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146,465,500	137,081,100	93.59%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,219,000	12,167,010	99.57%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,000,000	2,000,000	100.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360,668,000	351,665,933	97.50%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159,085,380	158,158,164	99.42%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159,085,380	158,158,164	99.42%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454,315,000	397,128,278	87.41%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,699,000	31,523,000	62.18%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185,068,000	148,093,078	80.02%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,228,000	10,192,200	99.65%

Lainnya			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	208,320,000	207,320,000	99.52%
Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	22,700,000	5,554,000	24.47%
Sub- Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	22,700,000	5,554,000	24.47%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	589,596,000	571,733,719	96.97%
Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	486,306,000	468,700,000	96.38%
Pengadaan mebel	8,774,000	8,774,000	100.00%
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	94,516,000	94,259,719	99.73%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,948,501,750	2,605,565,050	88.37%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,345,550,000	1,163,737,400	86.49%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	623,293,000	509,731,400	81.78%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	397,801,500	340,400,500	85.57%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	324,455,500	313,605,500	96.66%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1,602,951,750	1,441,827,650	89.95%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	29,667,000	3,074,900	10.36%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1,573,284,750	1,438,752,750	91.45%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,932,150,400	1,669,641,655	86.41%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1,073,790,000	911,950,255	84.93%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1,073,790,000	911,950,255	84.93%
Pendampingan dan Asistensi	858,360,400	757,691,400	88.27%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	265,443,500	239,095,500	90.07%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	402,493,500	341,716,500	84.90%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	190,423,400	176,879,400	92.89%
TOTAL	15,176,298,250	13,926,502,013	91.76%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Eselon II

Capaian kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level	Level 3	Level 3	100%
2	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Level 3	Level 3	100%

1. Sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan pengawasan pemerintah Daerah

Capaian kinerja yang merupakan indikator yang menjelaskan tentang karakteristik penyelenggaraan SPIP ditingkat Pemerintah Kota Banjarbaru. Indikator ini mempunyai makna peringkat pencapaian penyelenggaraan SPIP berupa tingkat maturitas dan skor. Proses PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2023 sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D).

Untuk mendapatkan capaian indikator kinerja tersebut, cara yang digunakan yaitu berdasarkan laporan hasil penilaian (*Assesment*) Maturitas SPIP oleh BPKP.

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 Perwakilan BPKP Prov. Kalsel No. PE.09.03./S-822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023, nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ialah Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3,165 atau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi). Artinya capaian untuk Indikator Kinerja Utama 100% sesuai dengan target pada Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru. Tahun 2023 merupakan tahun ke-3 dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1

No	Indikator Utama	Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022
			Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1	Maturitas Pengendalian Pemerintah level	Sistem Intern (SPIP)	3 (level) 100%	3 (Level) 100%

Merujuk pada data tersebut, capaian kinerja IKU 1 dibandingkan dengan dua tahun terakhir selalu mencapai target yang ditetapkan. *Trend* ini menunjukkan optimisme untuk mencapai target di akhir tahun Renstra yaitu level 3 berdasarkan tabel tersebut di atas realisasi capaian Indikator Kinerja Utama untuk Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah tercapai yaitu 100%.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja dengan
Kabupaten/Kota/Propinsi IKU

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Realisasi Kab. Banjar	Realisasi Kab. Tala	Realisasi Kota Banjarmasin	Propinsi Kal-Sel
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dibandingkan dengan kabupaten/ kota/ propinsi sekitar dengan nilai yang sama. Adapun beberapa kelemahan yang menyebabkan penurunan nilai yang perlu menjadi *area of improvement* (AOI) Pemerintah Kota Banjarbaru, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penetapan Tujuan
 - a) Pada kualitas sasaran strategis tingkat Pemda dan sasaran strategis/program tingkat OPD belum seluruhnya berorientasi hasil.
 - b) Selain itu, terdapat indikator kinerja tingkat Pemda dan tingkat OPD yang tidak tepat dan tidak cukup mengukur sasaran yang akan dicapai
 - c) terdapat target kinerja tingkat Pemda dan tingkat OPD yang belum memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound goals (SMART)*.
- 2) Struktur dan Proses
 - (a) Sub unsur 1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika, disebabkan unit kerja belum menjadi lingkungan belajar yang dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari perilaku koruptif

dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan situasi;

- (b) Sub unsur 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM, disebabkan belum seluruh pegawai mendapatkan fasilitas untuk memperoleh pelatihan/*workshop* ataupun diklat terkait manajemen risiko dan pencegahan kecurangan/*fraud*;
- (c) Sub unsur 1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait, disebabkan dalam menjalin hubungan kerja yang baik belum seluruh risiko kemitraan, pencegahan dan pengendalian kecurangan/*fraud* telah diidentifikasi dan dikelola;
- (d) Sub unsur 2.2 Analisis Risiko, disebabkan tindak pengendalian belum sepenuhnya diimplementasikan;
- (e) Sub unsur 3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi, disebabkan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kecurangan belum diimplementasikan secara optimal;
- (f) Sub unsur 4.2 Komunikasi yang Efektif, disebabkan komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal secara terstruktur dan berkala belum dilakukan evaluasi; dan
- (g) Sub unsur 5.1 Pemantauan Berkelanjutan, disebabkan proses manajemen risiko belum sepenuhnya dilakukan monitoring berkala atas tingkat keterjadian risiko beserta efektivitas rencana tindak penanganan risiko yang telah disusun.

3) Pencapaian Tujuan

- (a) Sasaran strategis tingkat Pemda dan sasaran strategis/program tingkat OPD belum seluruhnya berorientasi hasil;
- (b) Terdapat indikator Pemda dan OPD yang tidak tepat;
- (c) Terdapat target kinerja tingkat Pemda dan tingkat OPD yang belum memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound goals (SMART)*; dan
- (d) Terdapat temuan berulang atas keandalan pelaporan keuangan, pengamanan atas aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Kiat-kiat dalam upaya mencapai keberhasilan yang telah dilakukan :

- a. Perbaikan dokumen perencanaan pada tingkat Pemda dan OPD untuk memastikan sasaran strategis berorientasi hasil;
- b. Analisis atas indikator dan target agar memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound goals (SMART)*;
- c. Komitmen peningkatkan kompetensi pegawai terkait proses manajemen risiko pada tingkat Pemda maupun tingkat OPD, termasuk manajemen risiko kemitraan dan *fraud*;
- d. Pemutakhiran register risiko secara berkala mulai dari risiko strategis Pemda, risiko strategis OPD sampai dengan risiko operasional OPD; dan pengawasan dan reviu implementasi proses manajemen risiko secara menyeluruh

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah

Pencapaian IKU Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 08 Tahun 2021 tentang penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kami telah melakukan evaluasi terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Kota Banjarbaru, sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan nomor PE.09.03/LHP-314/PW16/6/2023 tanggal 30 Nopember 2023 terlampir.

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2023 berada pada level 3 (skala 1 – 5) dengan karakteristik *delivered*, yakni APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP telah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola. Simpulan per elemen kapabilitas APIP sebagai berikut :

Tabel 3.4
Elemen Kapabilitas APIP

No	ELEMEN	LEVEL	SKOR
KOMPONEN DUKUNGAN PENGAWASAN (ENABLER)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2	Praktik Profesional	3	0,540
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5	Struktur Tata Kelola	3	0,360
KOMPONEN AKTIVITAS PENGAWASAN (DELIVERY) DAN KUALITAS PENGAWASAN (RESULT)			
6	Peran dan Layanan	3	1,200
SIMPULAN ENTITAS		3	3,000

Pencapaian IKU Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2022 dari BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.03/LHP-314/PW16/6/2023 tanggal 30 Nopember 2023 menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2023 berada pada level 3, Artinya capaian untuk Indikator Kinerja Utama 100% sesuai dengan target pada Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru. Secara garis besar Level Kapabilitas APIP dapat dibandingkan dalam 2 tahun terakhir ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2 (82,78%)	Level 3 (100%)

Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2022 untuk Kapabilitas APIP sudah level 3 (2 tahun terakhir).

Merujuk pada data tersebut, capaian kinerja IKU 2 dibandingkan dengan dua tahun terakhir tidak mencapai target yang ditetapkan. *Trend* ini menunjukkan optimisme untuk mencapai target di akhir tahun Renstra yaitu level 3 di perlukan komitmen yang kuat untuk mencapai target tersebut. Ada pun Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten / Kota / Propinsi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja dengan
Kabupaten/Kota/Propinsi IKU

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Realisasi Kab. Banjar	Realisasi Kab. Tala	Realisasi Kota Banjarmasin	Propinsi Kal-Sel
1	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Banjarbaru sudah setara dengan kabupaten/ kota/ propinsi sekitar.

Dalam rangka peningkatan Level Kapabilitas APIP, terdapat AOI atas masing-masing elemen yang berhasil kami identifikasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1) Perencanaan SDM

Jumlah SDM khususnya PFA belum memenuhi rekomendasi kebutuhan JFA.

2) Pengembangan SDM Profesional APIP

- a) SDM yang memiliki sertifikasi dalam bidang pengelolaan risiko khususnya risiko kecurangan belum tersedia.
- b) Anggaran pengembangan SDM belum mengakomodasi sertifikasi non JFA/sertifikasi profesional, seperti CRMP, CFra, CGCAE.

b. Elemen Praktik Profesional Perencanaan Pengawasan

- 1) Program yang dihasilkan dari perencanaan pengawasan dan dijadikan objek audit kinerja bukan merupakan program lintas sektor.
- 2) OPD masih kurang memahami terkait manajemen risiko
- 3) Penilaian kematangan manajemen risiko belum dilakukan secara komprehensif.

c. Elemen Struktur dan Tata Kelola Mekanisme Pendanaan

Anggaran APIP untuk mendanai kegiatan pengawasan belum memenuhi 0,75% dari APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021.

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan

a. Audit Ketaatan

Dokumentasi atas monitoring tindak lanjut belum seluruhnya tertib.

b. Audit Kinerja

- 1) Audit kinerja belum dilakukan pada program strategis yang menjadi prioritas dalam peningkatan ekonomi daerah sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.
- 2) Audit kinerja belum dilakukan terhadap program lintas sektor

Untuk itu, rencana aksi yang perlu dilakukan sebagai sarana untuk penguatan berkelanjutan agar pemenuhan terhadap pernyataan menjadi semakin sempurna dan berkesinambungan, yakni sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemerataan kompetensi SDM, terutama untuk sertifikasi profesional manajemen risiko (CRMP dan CRMO), audit forensik (CFra), dan kepemimpinan lembaga audit intern (CGCAE).
2. Pemutakhiran data kompetensi pegawai
3. Peningkatan anggaran pengawasan Inspektorat Kabupaten Banjarbaru sesuai dengan Permendagri Nomor 15 tahun 2023 di luar gaji dan tunjangan pegawai.
4. Koordinasi dengan APIP lainnya terkait pembahasan peta pengawasan dan implementasi *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) melalui telaah sejawat
5. Peningkatan kualitas audit ketaatan sesuai dengan peraturan Deputy Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan
6. Peningkatan kualitas *probity audit* sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

7. Peningkatan kualitas audit kinerja pada program strategis yang menjadi prioritas dalam peningkatan ekonomi daerah sesuai dengan potensi keunggulan daerah dan lintas sektor
8. Pendokumentasian semua kegiatan jasa konsultasi secara tertib, baik di dalam maupun di luar kantor
9. Pelaksanaan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada level 3 secara berkesinambungan dan mempersiapkan untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi dengan melakukan evaluasi berkala atas kebijakan dan implementasi yang dilaksanakan.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Tahun 2023		Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 terhadap target Akhir Renstra
			Target	Realisasi		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 100%
Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 100%

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target Renstra yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dan perbandingan realisasi kinerja tahun ini, hal ini sudah tercapai target (capaian kinerja 100%)

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Mencermati dan memperhatikan sumberdaya aparatur yang terkait bidang pengawasan. Berikut program kegiatan yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran yaitu sebagai berikut :

a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan

Tabel 3.8
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran meningkatnya
penyelenggaraan pengawasan

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFESIENSI ANGGARAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Rp 2,948,501,750	Rp 2,605,565,050	88.37	11.63

Rata-rata efisiensi anggaran untuk indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran adalah sebesar 11,63%.

b. Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

Tabel 3.9
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran meningkatnya
Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI ANGGARAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Rp 1,932,150,400	Rp 1,669,641,655	86.41	13.59

Rata rata efisiensi anggaran untuk indikator Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan capaian kinerja 100% sebesar 13,59%.

Dalam pelaksanaan mendukung terealisasinya sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah” dituntut seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Pada Tahun 2023 untuk mendukung teralisasinya sasaran tersebut maka Inspektorat tidak melakukan penggeseran anggaran.

3.2 Capaian Kinerja Eselon III

Capaian realisasi kinerja Utama dengan target Sekretaris dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan fasilitasi Pengawasan	Presentase ketersedianya dokumen kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan dan fasilitasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	Meningkatnya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	100%
	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%
8	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%

Indikator pertama yaitu Presentase ketersedianya dokumen kebijakan teknis di bidang fasiliasi pengawasan dan fasilitasi Inspektorat Kota Banjarbaru di targetkan 1 dokumen dalam hal ini realisasi 1 dokumen tercapai, sehingga capaian kinerja nya 100%.

Indikator kedua yaitu Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD capaian untuk indicator tersebut 100% sesuai target yang ditentukan.

Indikator ketiga yaitu Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan capaian untuk indicator tersebut 100% sesuai target yang ditentukan.

Indikator keempat yaitu Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi di targetkan 100% realisasi 100%.

Indikator kelima yaitu Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi di targetkan 100% realisasi 100%.

Indikator keenam yaitu Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik di targetkan 100% realisasi 100%.

Indikator ketujuh yaitu Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik di targetkan 100% realisasi 100%.

Indikator kedelapan yaitu Cakupan Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan di targetkan 100% realisasi 100%

Upaya-upaya yang telah dilakukan :

1. Melakukan penertiban format perumusan surat keluar/surat masuk kantor berbasis aplikasi
2. Melengkapi dan memperbaiki sarana prasarana kantor khususnya dibagian pelayanan
3. Merekap segala urusan administrasi seluruh pegawai kantor

Hambatan dalam pencapaian kinerja, yaitu :

1. Pengarsipan surat menyurat yang kurang terorganisir
2. Ruang sarana pengarsipan surat/dokumen yang belum memadai

Rencana Tindak Lanjut

1. Mengatur dan mengorganisir mulai dari masuk surat sampai kepada pengarsipannya
2. Mengajukan anggaran ditahun berikutnya untuk rehab/perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dikantor

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir
Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2022
1	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan fasilitasi Pengawasan	Presentase ketersedianya dokumen kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan dan fasilitasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	Meningkatnya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
8	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Mencermati dan memperhatikan sumberdaya aparatur yang terkait target Sekretaris. Berikut Program Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran dan efesiensi penggunaan anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan fasilitasi Pengawasan

Tabel 3.12
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran meningkatnya
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFESIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Presentase ketersedianya dokumen kebijakan teknis di bidang fasiliasi pengawasan dan fasilitasi	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan fasilitasi Pengawasan	Presentase ketersedianya dokumen kebijakan teknis di bidang fasiliasi pengawasan dan fasilitasi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1,073,790,000	911,950,255	84.93	15.07

Rata rata efisiensi anggaran untuk indikator presentase ketersedianya dokumen kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan dan fasilitas dengan capaian kinerja 100% denga efesiensi anggaran sebesar 15,07%.

2. Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.13
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran meningkatnya
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	Meningkatnya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105,730,000	92,987,200	87.95	12.05

Rata rata efisiensi anggaran untuk indikator Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 12.05%.

3. Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 3.14
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran meningkatnya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFESIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,429,815,220	7,910,084,914	93.83	6.17

Rata rata efisiensi anggaran untuk indikator Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 6.17%.

4. Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tabel 3.15
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran meningkatnya
Administrasi Umum Perangkat Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFESIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	534,404,500	515,649,033	96.49	3.51

Rata rata efisiensi anggaran untuk indikator Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 3.51%.

5. Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.16
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran meningkatnya
Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFESIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159,085,380	158,158,164	99.42	0.58

Rata rata efisiensi anggaran untuk indikator Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi dengan capaian kinerja 100% dengan efesiensi anggaran sebesar 0.58%.

6. Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.17
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran meningkatnya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFESIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454,315,000	397,128,278	87.41	12.59

Rata rata efisiensi anggaran untuk indikator Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 12.59%.

7. Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.18

Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	589,596,000	571,733,719	96.97	3.03

Rata rata efisiensi anggaran untuk indikator Cakupan Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 3.03%.

8. Meningkatnya Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah

Tabel 3.19
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Pemerintahan Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	22,700,000	5,554,000	24.47	75.53

Rata rata efisiensi anggaran untuk indikator Cakupan layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dapat digunakan dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 75.53%.

Capaian realisasi kinerja Utama dengan target Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	90%	90%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan	85%	78%	91%
2	Meningkatnya Penanganan Kasus dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan SAP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SPIP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	90	92%	100%

1. Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pencapaian kinerja yang merupakan indikator

- a. Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan;

Capaian kinerja atas IKU Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Yang Selesai Ditindaklanjuti Oleh SKPD Sesuai Ketentuan dihitung berdasarkan rumus berikut ini :

$$\frac{\text{Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Yang Selesai Ditindaklanjuti Oleh SKPD}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang selesai di tindaklanjuti oleh SKPD}} \times 100\% = \frac{\text{Total rekomendasi hasil evaluasi Kinerja}}{\text{Total rekomendasi hasil evaluasi Kinerja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka perhitungan capaian kinerja tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja IKU 1} = \frac{32}{32} = 100\%$$

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan Inspektorat selaku unsur pengawas berjalan optimal, sehingga mengakibatkan perbaikan-perbaikan implementasi SAKIP SKPD.

Inspektorat tidak hanya sekedar melaksanakan evaluasi tetapi juga pembinaan. Pembinaan yang dilaksanakan dengan menjemput bola atau melakukan road show ke masing-masing SKPD tentang implementasi SAKIP. Sehingga pada akhirnya, sedikit demi sedikit para pemangku kepentingan di SKPD menyadari pentingnya

implementasi SAKIP dan berkomitmen untuk mendukung terlaksananya kinerja yang baik.

Artinya capaian untuk Indikator Kinerja Utama 100% sesuai dengan target pada Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru.

Trend ini menunjukkan optimisme untuk mencapai target di akhir tahun Renstra, yaitu 100% rekomendasi hasil evaluasi kinerja selesai ditindaklanjuti oleh SKPD. Hal ini dikarenakan adanya komitmen dari Walikota dan pemangku kepentingan SKPD.

Selain itu, Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2022 akan lebih *intens* melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap SKPD sehubungan dengan implementasi SAKIP.

b. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan

Indikator ini dipilih untuk memperlihatkan kinerja Inspektorat dalam memantau dan mendorong SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan pihak internal (APIP Kota) atas temuan yang ada pada SKPD yang bersangkutan.

Capaian kinerja atas IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan internal yang selesai ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan dihitung berdasarkan rumus berikut ini :

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang selesai ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan	Jumlah rekomendasi hasil Pemeriksaan Internal yang selesai ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan	hasil	x 100%
	Jumlah rekomendasi hasil Pemeriksaan Internal	hasil	

Data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal yang selesai ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan pada 31 Desember 2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Gambar 3.21
Tabel hasil pemeriksaan Internal
yang selesai ditindaklanjuti SKPD

Obrik	Kelemahan/ Temuan	Tindak Lanjut	
		Selesai	Belum Selesai (Dalam Proses)
Dinsos	4	4	4
Diskominfo	3	3	3
BKPP	1	1	1
Disperkim	1	1	1
Dinas PUPR	1	1	1
Satpol PP	2	2	2
DPRD	4	4	4
Pemberdayaan perempuan	3	3	3
kec. Cempaka	2	2	2
Disperkim	3	3	3
Kec. Liang Anggang	4	4	4
Disdag	2	2	2
SEKDA	1	1	1
BPBD	4	4	4
Dinkes	5	5	5
Diskominfo	2	2	2
Disporabudpar	10	10	10
Dinas Lingkungna Hidup	3	3	3
Diskominfo	3	3	3
SDN 3 KOMET	1	1	1
Dishub	4	4	4
SDN 2 Bangkal	1	1	1
Disporabudpar	4	4	4
Dinas Lingkungna Hidup	2	2	2
Pemberdayaan perempuan	3	3	3
DINSOS	3	3	3
Darpusda	4	4	4
BKPP	2	2	2
RSID	1	1	1
BPBD	3	3	3

SMP N 3	2	2	2
SMP N 6	3	3	3
Setdako	2	2	2
Kec. BBU	7	7	7
Kec. Cempaka	1	1	1
Disdag	1	1	1
Disdik	3	3	2
SMP N 12	2	2	2
Bangesbangpol	1	1	1
Diskominfo	3	3	3
Kec. Landasan Ulin	2	2	2
Dinas PUPR	3	3	3

Berdasarkan data tersebut maka dapat digambarkan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan pada tahun 2023 capaian kinerja 100%.

- c. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)” diukur dengan menggunakan IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Selesai Ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan.

Indikator ini dipilih untuk memperlihatkan kinerja Inspektorat dalam memantau dan mendorong SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan pihak eksternal khususnya BPK atas temuan yang ada pada SKPD yang bersangkutan.

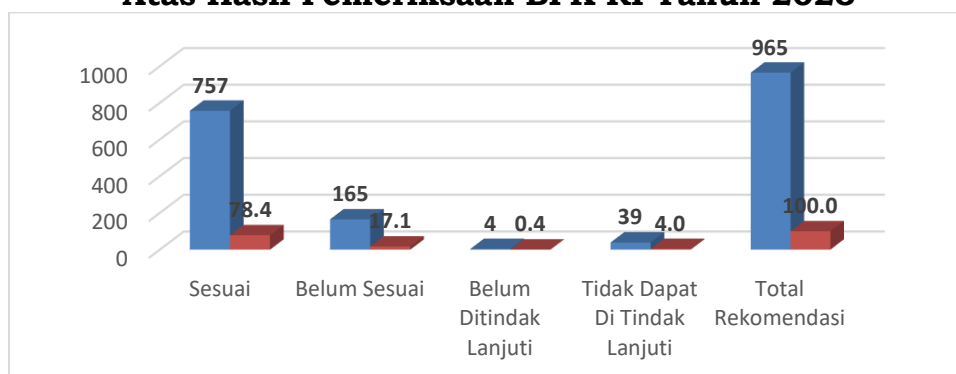
Realisasi atas Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan didapat dari aplikasi portal BPK yang diakses oleh admin Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.

Capaian kinerja atas IKU Persentase Rekomendasi Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang selesai ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan dihitung berdasarkan rumus berikut ini :

$$\frac{\text{Persentase Rekomendasi Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang selesai ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)}} \times 100\%$$

Data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Pemerintah Kota Banjarbaru pada 31 Desember 2023 menunjukkan rekapitulasi hasil pemantauan hasil pemeriksaan BPK RI pada semester II Tahun 2023. Rekapitulasi tersebut menunjukkan status rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD yang ditunjukkan pada Gambar berikut ini :

Gambar 3.22
Status Tindak Lanjut Rekomendasi
Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2023

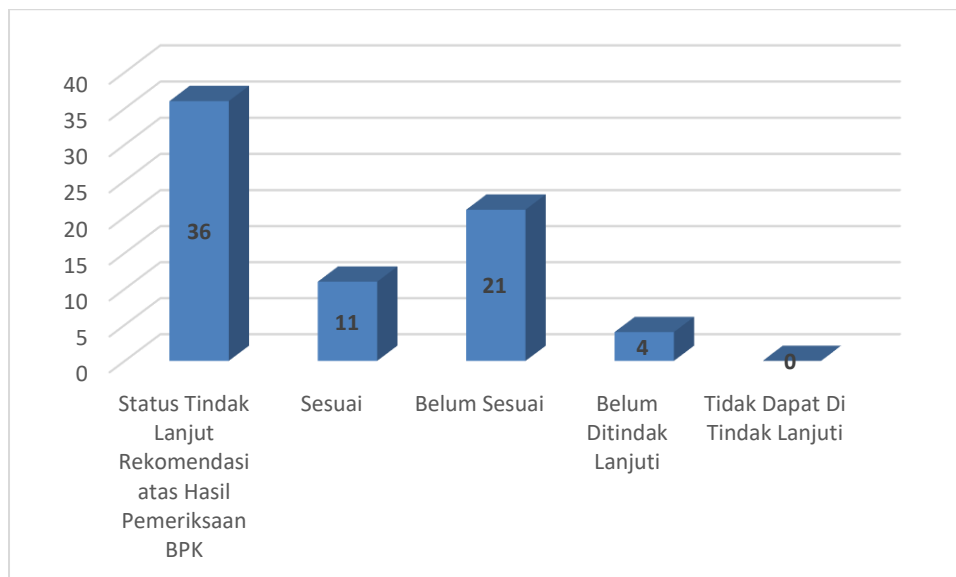


Gambar 3.2 menunjukkan status tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 terdapat temuan rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI.

Dari jumlah tersebut terdapat 965 temuan rekomendasi dengan 757 rekomendasi (78,4%) yang statusnya sesuai, 165 rekomendasi (17,1%) yang statusnya belum sesuai, 4 rekomendasi (0,4%) yang statusnya belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 39 rekomendasi (4,0%) yang statusnya tidak dapat ditindaklanjuti.

Berdasarkan data tersebut maka dapat digambarkan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Selesai Ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan pada tahun 2023 pada gambar berikut ini :

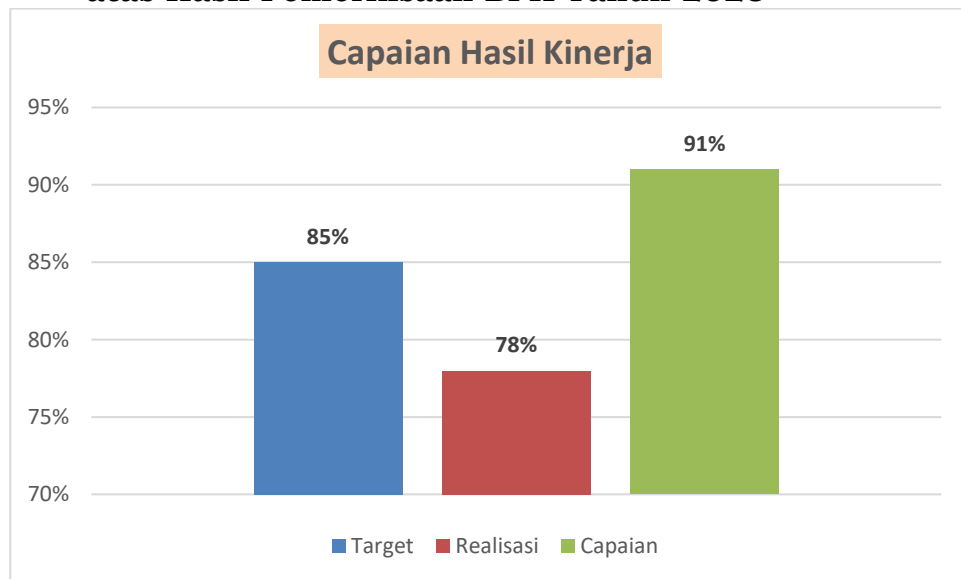
Gambar 3.23
Realisasi Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Selesai Ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan pada tahun 2023



Berdasarkan gambar 3.23 menunjukkan bahwa status Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 terdapat 36 rekomendasi yang mana dari hasil rekomendasi yang sesuai yaitu sebanyak 11 rekomendasi,

ada 21 rekomendasi yang belum sesuai, ada 4 rekomendasi yang belum di tindak lanjuti dan tindak lanjut hasil rekomendasi telah di upload kembali namun belum di verifikasi BPK RI.

Gambar 3.24
Capaian hasil kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi
atas Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023



Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Selesai Ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan belum mencapai target yang ditentukan dari 85% dengan realisasi 78% jadi capaian kinerja 91,70%

2. Sasaran strategis Meningkatnya Penanganan Kasus dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pencapaian kinerja yang merupakan indikator Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan SAP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan.

Indikator ini dipilih untuk memperlihatkan kinerja Inspektorat dalam mengurangi jumlah temuan hasil pemeriksaan Eksternal (BPK dan APIP Provinsi Kalsel). Ketika kinerja Inspektorat meningkat dengan melakukan pengawasan dan pembinaan atas kepatuhan SKPD terhadap peraturan dan perundang-undangan, diharapkan dapat mengurangi jumlah temuan eksternal.

Berikut Rumus perhitungan capaian kinerja :

$$\frac{\text{Persentase Ketidaksesuaian dgn SAP yang Selesai Ditindaklanjuti Oleh SKPD}}{\text{Ketidaksesuaian dgn SAP yang selesai di tindaklanjuti oleh SKPD}} \times 100\% = \text{Total Ketidaksesuaian dgn SAP}$$

Adapun hasil rekap Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan SAP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan tahun 2022

Tabel 3.25
Rekap Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan SAP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan Tahun 2023

Bulan	Jenis Pengawasan	Jumlah tanggapan hasil pemeriksaan	Jumlah tanggapan yang sudah di tindak lanjuti
	Reviu	11	11
	Monitoring	2	2
	Evaluasi	2	2
	Audit Investigasi	5	5
	Audit Tujuan Tertentu	4	4

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa rekomendasi ketidaksesuaian telah ditindaklanjuti oleh SKPD 100%.

Hal tersebut tidak terlepas dari tingkat kepatuhan SKPD yang semakin meningkat atas ketentuan dan/atau peraturan perundangan-undangan. Serta tidak terlepas dari Inspektorat selaku SKPD pengawas dan pembinaan atas SKPD.

Tabel 3.26
Perbandingan realisasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3		4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	94,17%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan	99,77%	91%
2	Meningkatnya Penanganan Kasus dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan Perundang-undangan yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	100%	100%
3	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase ketersediaan dokumen kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan dan fasilitasi	1 dokumen	1 dokumen
		Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi		88%

Berikut perbandingan realisasi capaian kinerja merujuk pada data tersebut, capaian kinerja untuk eselon III (irban) dibandingkan dengan dua tahun terakhir selalu mencapai target yang ditetapkan. *Trend* ini menunjukkan optimisme untuk mencapai target di akhir tahun Renstra tabel tersebut di atas realisasi capaian Indikator Kinerja Eselon III sudah tercapai yaitu 100%.

Adapun upaya upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut :

- ✓ Berupaya membangun komunikasi yang efektif dalam mensosialisasikan kebijakan atau prosedur pengendalian atas kegiatan pokok unit organisasi dan mendokumentasikannya secara konsisten

- ✓ Mengkomunikasikan kembali dengan seluruh penanggung jawab kegiatan di SKPD yang telah ada melalui rapat atau focus group discussions (FGD).
- ✓ Mempertegas kembali komitmen SKPD dalam menindak lanjuti rekomendasi yang belum/masih dalam proses penyelesaian
- ✓ Melakukan pengawasan yang intensif melalui kegiatan monitoring tindak lanjut temuan pengawasan
- ✓ Membuka peluang konsultasi dan pembinaan yang lebih optimal ke tiap-tiap SKPD

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sedangkan pencapaian kinerja sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran bagi Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi sebagai berikut :

a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tabel 3.27
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran meningkatnya
Penyelenggaraan Pengawasan Internal

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFESIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,345,550,000	1,163,737,400	86.49	13.51
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan					
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan					

Rata rata efisiensi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 13.51%.

b. Meningkatnya Penanganan Kasus dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Tabel 3.28
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran meningkatnya Penanganan Kasus dan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan SAP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	Meningkatnya Penanganan Kasus dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan SAP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1,602,951,750	1,441,827,650	89.95	10.05

Rata rata efisiensi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 10.05%.

9. Meningkatnya Asistensi dan Pendampingan

Tabel 3.29
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran meningkatnya
Asistensi dan Pendampingan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFESIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SPIP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	Meningkatnya Asistensi dan Pendampingan	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SPIP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	Pendampingan dan Asistensi	858,360,400	757,691,400	88.27	11.73

Rata rata efisiensi anggaran untuk indikator presentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SPIP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan dan Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi dengan capaian kinerja 98% dengan efisiensi anggaran sebesar 11,73%.

3.3 Capaian Kinerja Eselon IV

Capaian realisasi kinerja Utama dengan target Kasubbag Umum
Kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32 SKPD	32 SKPD	100%
2	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Saberpungli	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32 SKPD	32 SKPD	100%
4	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	2 paket	2 paket	100%
5	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	100%
6	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
7	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%
9	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100%
10	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	100%
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%

12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100%
13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	13 unit	100%
14	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 jenis	5 jenis	100%
15	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	1 paket	100%
16	Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	15 unit	100%

Capaian kinerja dari Kasubbag Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

Secara umum, kegiatan rutin perkantoran dan administrasi kepegawaian dapat terealisasi 100% seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sarana dan Prasarana dipenuhi berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh kantor, untuk Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib merupakan pegawai yang terlayani untuk keperluan naik pangkat, berkala, cuti, dan pensiun, kedepan indikator ini akan ditambahkan dengan pelayanan Sasaran Kinerja Pegawai.

Terdapat 16 sasaran kegiatan yang mana dari semua indikator tersebut semua nya telah tercapai 100% hasil capaiannya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sedangkan pencapaian kinerja sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran bagi Kasubbag Umum dan kepegawaian yaitu sebagai berikut :

1. Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tabel 3.31
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFESIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,052,000	12,734,990	97.57	2.43

Rata-rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 2,43%.

2. Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tabel 3.32
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFESIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146,465,500	137,081,100	93.59	6.41

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 6,41%.

3. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tabel 3.33
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFESIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,219,000	12,167,010	99.57	0.43

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan Terlaksananya Penyediaan Barang cetak dan penggandaan dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,43%.

4. Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tabel 3.34
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,504,000	9,504,000	100.00	0.00

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan Terlaksananya Penyediaan Barang cetak dan penggandaan dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,00%.

5. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tabel 3.35
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360,668,000	351,665,933	97.50	2.50

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 2,50%.

6. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tabel 3.36
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFESIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159,085,380	158,158,164	99.42	0.58

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,58%.

7. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tabel 3.37

Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFESIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,699,000	31,523,000	62.18	37.82

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 37,82%.

8. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Tabel 3.38

Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185,068,000	148,093,078	80.02	19.98

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 19,98%.

9. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tabel 3.39
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,228,000	10,192,200	99.65	0.35

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,35%.

10. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 3.40
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	208,320,000	207,320,000	99.52	0.48

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,48%.

11. Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tabel 3.41

**Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	94,516,000	94,259,719	99.73	0.27

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,27%.

12. Terlaksananya Pengadaan Mebel

Tabel 3.42

**Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya
Pengadaan Mebel**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFESIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	8,774,000	8,774,000	100.00	0.00

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan pengadaan Mebel capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,00%.

13. Terlaksananya Pengadaan Mebel

Tabel 3.43
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya
Pengadaan Mebel

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFESIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	8,774,000	8,774,000	100.00	0.00

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan pengadaan Mebel capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,00%.

14. Terlaksananya Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan

Tabel 3.44
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya
Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	486,306,000	468,700,000	96.38	3.62

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 3,62%.

15. Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD

Tabel 3.45
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Cakupan layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	22,700,000	5,554,000	24.47	75.53

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 75,53%.

Capaian realisasi kinerja Utama dengan target Kasubbag Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.46
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO .	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIA N
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%
2	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen	100%
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	10 laporan	100%
4	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	70 orang/ bulan	70 orang/ bulan	100%
5	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
6	Terlaksananya Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	100%

Capaian kinerja dari Kasubbag Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut : secara umum telah memnuhi target kinerja dalam ini capaiannya sudah 100%.

Dokumen perencanaan maupun laporan yang disusun di sub bagian perencanaan pelaporan diantaranya adalah Dokumen Renja Akhir Tahun 2024, Renja Awal Tahun 2024, Renja Perubahan

Tahun 2023, RKA Perubahan Tahun 2023, RKA Tahun 2024, LKjIP Tahun 2022, Draft LAKIP Tahun 2022, Laporan Pengukuran Kinerja Bulanan, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Laporan Kinerja Tahunan 2022; dan Evaluasi Triwulan. Hal ini disebabkan kriteria dan komponen pelaporan yang semakin banyak. Strategi untuk peningkatan indikator terus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk penyempurnaan laporan dan menyelesaikannya dengan rentang waktu yang telah disediakan.

a. Upaya yang telah dilakukan :

- Akan dilakukan perbaikan secara terus menerus dari Komponen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

b. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Masih belum maksimal pemanfaatan instrumen pengukuran dan evaluasi

c. Rencana Tindak Lanjut

- Masih rendahnya AKIP untuk komponen pengukuran kinerja. Hal ini akan direview kembali tata cara pengukuran pada setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi secara terus menerus untuk memastikan target capaian yang akan dirumuskan secara terstruktur dan terukur.

Sedangkan pencapaian kinerja sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran bagi Kasubbag Perencanaan dan keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Tabel 3.47

**Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFESIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1,073,790,000	911,950,255	84.93	15.07

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 15,07%.

2. Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah

Tabel 3.48

**Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFESIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36,000,000	28,828,700	80.08	19.92

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 19,92%.

3. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tabel 3.49
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69,730,000	64,158,500	92.01	7.99

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 7,99%.

4. Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tabel 3.50
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,405,856,420	7,892,887,914	93.90	6.10

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 6,10%.

5. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tabel 3.51
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,432,000	9,269,200	60.06	39.94

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 39,94%.

6. Terlaksananya Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran

Tabel 3.52
Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran Terlaksananya
Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8,526,80 0	7,927,800	92.98	7.02

Rata rata efisiensi anggaran untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPDⁱ dengan capaian kinerja 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 7,02%.

Untuk perbandingan bagi eselon IV belum bisa ditampilkan karena masing-masing indikator sub kegiatan sudah menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sehingga perbandingan 2 tahun sebelumnya belum bisa ditampilkan karena adanya perbedaan indikator dari masing-masing sub kegiatan

3.4 Realisasi anggaran

Sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2023 Inspektorat Kota Banjarbaru di tunjang dengan sumber dan APBD sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA	15,176,298,250	13,926,502,013	91.76
1	BELANJA OPERASI	14,386,702,250	13,155,768,294	91.44
	Belanja Pegawai	8,461,296,420	7,944,547,914	93.89
	Belanja Barang	5,925,405,830	5,211,220,380	87.95
2	BELANJA MODAL	789,596,000	770,733,719	97.61
	Belanja Peralatan dan Mesin	589,596,000	571,733,719	96.97
	Belanja Bangunan dan Gedung	200,000,000	199,000,000	99.50

Untuk Belanja Operasional dari anggaran Rp.14.386702.250,- telah di realisasikan dengan belanja SKPD sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 13.155.768.294,- sedangkan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 789.596.000,- terealisasi dengan belanja SKPD sampai 31 Desember 2023 Rp. 770.733.719,- sedangkan sisa anggaran Rp. 1.249.796.237,-

Berikut ini rekapitulasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2023, yaitu :

PROGRAM /KEGIATAN	PAGU Anggaran	Realisasi	Persentasi Anggaran	Persentasi Fisik	Saldo
TOTAL	15,176,298,250	13,926,502,013	91.76%	100.00%	1,249,796,237
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,295,646,100	9,651,295,308	93.74%	100.00%	644,350,792
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105,730,000	92,987,200	87.95%	100.00%	12,742,800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36,000,000	28,828,700	80.08%	100.00%	7,171,300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69,730,000	64,158,500	92.01%	100.00%	5,571,500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,429,815,220	7,910,084,914	93.83%	100.00%	519,730,306
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,405,856,420	7,892,887,914	93.90%	100.00%	512,968,506
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,432,000	9,269,200	60.06%	100.00%	6,162,800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8,526,800	7,927,800	92.98%	100.00%	599,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	534,404,500	515,649,033	96.49%	10.00%	18,755,467
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,052,000	12,734,990	97.57%	100.00%	317,010
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146,465,500	137,081,100	93.59%	100.00%	9,384,400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,219,000	12,167,010	99.57%	100.00%	51,990
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,000,000	2,000,000	100.00%	100.00%	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360,668,000	351,665,933	97.50%	100.00%	9,002,067
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159,085,380	158,158,164	99.42%	100.00%	927,216
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159,085,380	158,158,164	99.42%	100.00%	927,216
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454,315,000	397,128,278	87.41%	100.00%	57,186,722
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,699,000	31,523,000	62.18%	100.00%	19,176,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185,068,000	148,093,078	80.02%	100.00%	36,974,922
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,228,000	10,192,200	99.65%	100.00%	35,800
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	208,320,000	207,320,000	99.52%	100.00%	1,000,000
Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	22,700,000	5,554,000	24.47%	100.00%	17,146,000
Sub- Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	22,700,000	5,554,000	24.47%	100.00%	

PROGRAM /KEGIATAN	PAGU Anggaran	Realisasi	Persentasi Anggaran	Persentasi Fisik	Saldo
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	589,596,000	571,733,719	96.97%	100.00%	
Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	486,306,000	468,700,000	96.38%	100.00%	17,606,000
Pengadaan mebel	8,774,000	8,774,000	100.00%	100.00%	0
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	94,516,000	94,259,719	99.73%	100.00%	256,281
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,948,501,750	2,605,565,050	88.37%	100.00%	342,936,700
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,345,550,000	1,163,737,400	86.49%	100.00%	181,812,600
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	623,293,000	509,731,400	81.78%	100.00%	113,561,600
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	397,801,500	340,400,500	85.57%	100.00%	57,401,000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	324,455,500	313,605,500	96.66%	100.00%	10,850,000
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1,602,951,750	1,441,827,650	89.95%	100.00%	161,124,100
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	29,667,000	3,074,900	10.36%	100.00%	26,592,100
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1,573,284,750	1,438,752,750	91.45%	100.00%	134,532,000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,932,150,400	1,669,641,655	86.41%	100.00%	262,508,745
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1,073,790,000	911,950,255	84.93%	100.00%	161,839,745
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1,073,790,000	911,950,255	84.93%	100.00%	161,839,745
Pendampingan dan Asistensi	858,360,400	757,691,400	88.27%	100.00%	100,669,000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	265,443,500	239,095,500	90.07%	100.00%	26,348,000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	402,493,500	341,716,500	84.90%	100.00%	60,777,000
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	190,423,400	176,879,400	92.89%	100.00%	13,544,000
TOTAL	15,176,298,250	13,926,502,013	91.76%	100.00%	1,249,796,237

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan kinerja Inspektorat Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu juga mencerminkan sejauh mana SAKIP telah diimplementasikan. Penghitungan capaian kinerja tahun 2023 telah dilakukan melalui perbandingan realisasi dengan target sesuai Perjanjian Kinerja, baik oleh Eselon II, Eselon III, maupun Eselon IV. Kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru tercermin dari pencapaian sasaran strategis sebagai berikut.

Tabel 4.1
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan					
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	3	3	100%
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi					
1.	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	100%

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Inspektorat Tahun 2023 memenuhi target kinerja. LKj Inspektorat Tahun 2024 diharapkan sebagai pemacu peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya. Sehingga, pada akhirnya mampu mencapai target pada akhir tahun Renstra.

Selain itu, Lkj ini juga diharapkan sebagai bahan umpan balik untuk perumusan strategi yang lebih baik di masa yang akan datang.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat untuk periode yang akan datang, diharapkan agar mampu melaksanakan hal-hal berikut ini :

1. Melakukan perencanaan yang matang terhadap tiap-tiap kegiatan sehingga mampu mengurangi dampak risiko
2. Meningkatkan Koordinasi dengan Lembaga Pengawas Eksternal dalam hal ini BPKP perwakilan Kalimantan Selatan dalam upaya mendukung peningkatan level Maturitas SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP Kota Banjarbaru;
3. Melakukan pengawasan yang intensif melalui kegiatan monitoring tindak lanjut temuan pengawasan;
4. Mempertegas kembali komitmen SKPD dalam menindak lanjuti rekomendasi yang belum/masih dalam proses penyelesaian;
5. Meningkatkan kualitas APIP baik melalui keikutsertaan dalam Diklat Teknis dan substantif maupun melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
6. Menetapkan jadwal kegiatan yang pasti pelaksanaannya untuk meminimalkan berubahnya jadwal kegiatan;
7. Membuka peluang konsultasi dan pembinaan yang lebih optimal ke tiap-tiap SKPD;
8. Melakukan koordinasi dengan optimal dengan SKPD terkait sehubungan dengan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK;

9. Menggunakan realisasi kinerja hasil tahun sebelumnya sebagai alternatif pengukuran kinerja yang hasilnya belum diketahui sampai dengan tahun berjalan.

Banjarbaru, Februari 2024

Inspektur
Kota Banjarbaru



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
NIP. 19700615 199003 1 006